

IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) DI DESA PURWADADI KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS

Hikmah Fitri

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : hikmahfitri873@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau dikenal dengan akronim Bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera, dengan memperhatikan dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis belum efektif. Hal ini terlihat dari masih kurangnya sumber daya serta komunikasi dan koordinasi tidak lancar diantara pihak-pihak yang terlibat implementasi.

Kata Kunci : *Implementasi, program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera*

PENDAHULUAN

Pemerintah telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program salah satunya yakni program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Pemerintah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak dalam mengimplementasikan program tersebut

agar berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kementan memproyeksi bahwa pengembangan program BEKERJA berbasis Pertanian ini akan berdampak pada peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan konsumsi pangan dan kualitas gizi keluarga, serta peningkatan ekonomi/pendapatan masyarakat agar terangkat menjadi masyarakat sejahtera.

Tidak hanya itu, program ini juga pada saat yang sama juga akan berdampak terhadap membaiknya kondisi sosial masyarakat.

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis pertanian diluncurkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 yang selanjutnya dirubah melalui Peraturan Menteri Pertanian No.27/PERMENTAN/RC.120/5/2018.

Program tersebut merupakan upaya untuk pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Bantuan pemerintah yang dilaksanakan dalam kaitan dengan Program BEKERJA oleh Badan Litbang Pertanian adalah dalam rangka permasyarakatan inovasi hasil penelitian pertanian.

Kabupaten Ciamis adalah salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan program. Bantuan berupa bibit ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) sebanyak 299.650 ekor.

Implementasi Program BEKERJA di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis belum efektif, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat menjual bantuan ayam dengan alasan tidak mampu membeli pakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari program, yang seharusnya ayam dipelihara dan

diternak sebagai sarana peningkatan gizi dan peningkatan taraf hidup masyarakat sesuai dengan tujuan program.

2. Kurangnya pengetahuan pendamping desa dalam penanganan ternak ayam KUB.
3. Terbatasnya kapasitas pendamping desa dalam mendampingi masyarakat penerima bantuan program Bekerja, dimana jumlah pendamping hanya 6 orang sementara masyarakat penerima bantuan program sebanyak 210 orang.
4. Penetapan waktu subsidi pakan kurang, dimana ayam belum bertelur tetapi subsidi pakan sudah dicabut.

Dalam peneitian ini ditetapkan fokus permasalahan sebagai berikut:

“Sejauh mana keberhasilan proses implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis?”

Selanjutnya fokus permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi

program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

Grindle (1980 : 7) mengatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai

konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan *outcome*. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat.

Implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Menurut Sabiter dalam Kadji (2008: 29) bahwa makna implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi

pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun lamanya penelitian yang penulis lakukan yaitu 9 bulan lamanya. Bertempat di Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yakni terdiri dari kasi kesejahteraan Desa Purwadadi, tim pendamping desa, dan masyarakat penerima bantuan program BEKERJA.

Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah).

Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini ialah berupa analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan kegiatan untuk memecahkan masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah.

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan lebih spesifik maka peneliti memfokuskan pada implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Fokus kajian

pada penelitian ini mencakup implementasi program pengentasan kemiskinan yang ditentukan oleh :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, dengan indikator:
 - a. Realisasi tujuan kebijakan
 - b. Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan warga
 - c. Kriteria Program
2. Sumber daya, dengan indikator:
 - (1) Sumber daya manusia
 - (2) Sumber dana
 - (3) Waktu
3. Karakteristik agen pelaksana, dengan indikator:
 - (1) Sikap pelaksana program
 - (2) Dukungan kepada masyarakat
 - (3) Semangat kerja pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, dengan indikator:
 - (1) Kejujuran pelaksana program
 - (2) Keseriusan pelaksana dalam melayani masyarakat penerima bantuan program
 - (3) Intensitas kerja pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dengan indikator:

- (1) Koordinasi pihak-pihak yang terlibat proses implementasi
- (2) Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat proses implementasi
- (3) Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat proses implementasi

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, dengan indikator:

- (1) Kondisi ekonomi masyarakat Desa Purwadadi
- (2) Situasi Politik
- (3) Solidaritas sesama penerima bantuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan melakukan pembahasan mengenai Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, pada umumnya implementasi program BEKERJA belum berjalan dengan baik, yang ditunjukkan oleh belum efektifnya pemenuhan dimensi-dimensi sebagai ukuran keberhasilan implementasi program.

Dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan belum efektif, dimana tujuan program tersebut adalah menambah rumah tangga peternakan, meningkatnya produksi ayam lokal dan tersedianya sumber protein hewani, namun program tersebut kurang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada malah menambah kebutuhan masyarakat, masyarakat harus memenuhi kebutuhan pakan ayam sementara harga pakan mahal dan masyarakat tidak mampu untuk membelinya.

Dalam dimensi sumber daya masih kurang optimal, yang mana pendamping desa kurang berkompeten karena sebelumnya tidak diberi pelatihan pendampingan. Selanjutnya mengenai finansial dapat dikatakan baik namun masih kurang karena tidak ada anggaran untuk pembelian kantong plastik untuk distribusi pakan ke tiap RTM. Kemudian untuk sumber daya waktu dapat dikatakan kurang untuk masa pendampingan.

Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana masih kurang baik. Masih terdapat karakteristik beberapa badan yang terlibat yang kurang baik. Karakteristik dari pelaksana program ini seharusnya demokratis dan persuasif, namun pada kenyataannya masih terdapat agen pelaksana yang tidak mendengarkan keluhan masyarakat.

Dalam dimensi sikap atau kecenderungan para pelaksana dapat dikatakan masih kurang efektif, terlihat

dari kurangnya intensitas kerja pelaksana dalam pengecekan kondisi ayam KUB ke tiap RTM dikarenakan jumlah petugas kurang mencukupi. Jumlah RTM dengan jumlah pendamping desa tidak seimbang, sehingga melebihi kapasitas pendamping.

Dalam dimensi komunikasi masih kurang efektif, dimana tidak terjalin komunikasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat implementasi. Koordinasi kurang berjalan baik, pihak-pihak tertentu seperti BPTP, dinas peternakan Kabupaten ciamis, BPP sulit dalam melakukan koordinasi. Sehingga pada dimensi ini dikatakan masih belum efektif.

Dalam dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan budaya masih belum efektif, dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat desa masih relatif rendah, dengan tipologi pesawahan dan mayoritas bermatapenceharian petani. Selanjutnya kurangnya solidaritas diantara masyarakat penerima bantuan program. Kemudian untuk situasi politik saat itu kurang kondusif, karena selepas pilpres 2019.

2. Hambatan Dalam Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat

Sejahtera (BEKERJA) Di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.

Dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan masih terdapat hambatan, dimana tidak ada kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan warga, masyarakat kecil tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam, harga pur dan dedak mahal, meskipun dengan alternatif dedak tapi ayam jika diberi pakan dedak tidak bertelur, bahkan ada masyarakat yang tidak sanggup untuk membeli dedak sekalipun karena untuk kebutuhan makan untuk sendiri juga susah pada saat itu.

Dalam dimensi sumber daya masih terdapat hambatan, terlihat dalam kurangnya kompetensi pendamping desa dalam mendampingi RTM dikarenakan pendamping tidak diberi pelatihan pendampingan terlebih dahulu. Kemudian kurangnya jumlah pendamping desa.

Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana masih terdapat hambatan, dimana sikap pelaksana dalam implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera, sikap dari petugas dinas teknis terkait kurang respon saat terdapat kendala di lapangan.

Terdapat hambatan dalam dimensi sikap atau kecenderungan para pelaksana, dimana kurangnya intensitas kerja pelaksana dalam mengimplementasikan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera, yakni

petugas tidak intensif dalam memantau perkembangan ayam dikarenakan jumlah petugas yang terbatas.

Dalam dimensi komunikasi terdapat hambatan, terlihat dari kurang baiknya komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA).

Masih terdapat hambatan dalam dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Purwadadi kurang kondusif, tingkat perekonomian masyarakat masih rendah dan berpenghasilan tidak menentu.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Hambatan Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis

Implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan masih kurang baik karena masih terdapat hambatan sehingga diperlukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Namun upaya-upaya yang dilakukan

kurang tepat karena mengambil jalan pintas. Masyarakat memahami bahwa program tersebut bertujuan untuk budidaya telur, akan tetapi masyarakat tidak mampu untuk membeli pakan ternak sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan menjual ayam tersebut.

Dalam dimensi sumber daya yakni masih terdapat hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendamping desa kurang berkompeten karena sebelumnya tidak diberi pelatihan pendampingan, kemudian pendamping berupaya untuk belajar otodidak. Selanjutnya untuk mengatasi kurangnya jumlah pendamping, maka dilakukan upaya getokt ular dalam penyampaian edukasi kepada masyarakat penerima bantuan program.

Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana yakni masih terdapat hambatan sehingga memerlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, namun belum ada upaya yang signifikan dalam mengatasi hambatan pada sikap pelaksana dalam implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera.

Dalam dimensi sikap atau kecenderungan, untuk mengatasi kurangnya intensitas dalam memantau perkembangan ayam yakni masyarakat langsung mendatangi rumah pendamping untuk konsultasi perkembangan ayam.

Dalam demensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

terdapat hambatan dalam komunikasi dan koordinasi sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mengatasi hambatan sulitnya komunikasi dengan pihak BPP, pendamping desa langsung menghubungi pihak BPTP dan melaporkan banyak ayam yang mati namun dalam penanganannya telat sehingga kondisi sudah kritis.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa tidak ada solidaritas diantara masyarakat penerima program dikarenakan memiliki hambatan kesibukan masing-masing. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan satu waktu mengajak untuk konsultasi bersama dengan pendamping.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan:

Implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis secara umum belum optimal, dimana semua dimensi belum berjalan dengan optimal. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa indikator-indikator ukuran implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) belum efektif, hal tersebut dapat dibuktikan dari sumber daya

manusia yang kurang kompeten karena sebelumnya tidak diberi pelatihan pendampingan, penetapan waktu yang kurang, ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, komunikasi dan koordinasi yang tidak lancar diantara pihak-pihak yang terlibat implementasi.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) sebagai berikut: ayam terserang penyakit, tidak mampunya masyarakat untuk membeli pakan karna harga pur mahal, telatnya subsidi pakan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pendamping desa kurang berkompeten, terbatasnya kapasitas pendamping, kurangnya koordinasi diantara pendamping desa dengan instansi yang terlibat, kurangnya respon dari dinas teknis terkait saat pendamping melapor banyak ayam yang meninggal, tidak terjalin kerjasama tim yang baik diantara para pelaksana dalam implementasi program BEKERJA tersebut.

Kemudian upaya –upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), yaitu sebagai berikut: upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kurangnya jumlah pendamping yaitu dengan getok tular, upaya yang sudah dilakukan dalam

mengatasi mahal nya harga pur yaitu masyarakat membeli dedak untuk pakan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya kompetensi adalah dengan belajar sendiri atau otodidak untuk menjawab keluhan dari masyarakat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya respon dari dinas peternakan adalah dengan langsung menelpon ke pihak BPTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Alam, A. S. (2012). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 78-92.
- Ali Khomsan dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Andhika, L. R. (2017). Meta-Theory: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(1), 41-55.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Edi Suharto. (2012). *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Fachrudin, R. (2015). Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah kota balikpapan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Herlina, N., & Komariah, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 260-277.
- Leo agustino. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riant Nugroho. (2014). *Publik Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan*

- Evaluasi*). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Administrasi Negara*, 5, 6737-6750.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-9.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan Universitas Hasanuddin. rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Syamsuddin, S. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*.
- Uddin B. Sore dan Sobirin. (2007). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Yanuar Ikbar. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syamsir, Nurfahira. (2014) "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar".